



Analisis Kebijakan Pendidikan Berkualitas di Pesantren Modern Provinsi Aceh



Fauzul Atqia^{1*}, Siti Nur Zalikha² Putri Marzaniar³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the implementation of quality education policies in modern pesantren in Aceh Province in the context of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Using a qualitative method with a case study approach, especially multiple case studies, researchers observed several pesantren in Aceh, the data sources used to study quality education policies in modern pesantren in Aceh are primary and secondary data sources. The data collection techniques used in this research are semi-structured interviews and direct observation, The data validity technique in this research is data triangulation. This research explores the efforts of pesantren in providing inclusive learning opportunities, providing quality education according to the needs and abilities of students, and creating a learning environment that respects diversity. The results showed that pesantren have tried to implement quality education policies through various talent development programs, learning flexibility, and activities that promote diversity. However, there are still challenges such as limitations in accommodating students with special needs and creating a fully inclusive environment. This study also analyzes the contribution of the non-government sector, particularly the Dayah Ramah Anak program by Aceh Hijau NGO, in supporting quality education policies in pesantren. This study highlights the importance of multi-stakeholder collaboration and policy adjustments to achieve quality education standards in accordance with the SDGs in Aceh's modern pesantren environment.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di pesantren modern Provinsi Aceh dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus khususnya multiple case study, Peneliti melakukan pengamatan pada beberapa pesantren di Aceh, Sumber data yang digunakan untuk mengkaji kebijakan pendidikan berkualitas di pesantren modern Aceh yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan observasi langsung, Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. penelitian ini menggali upaya pesantren dalam memberikan kesempatan belajar yang inklusif, menyediakan pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuan santri, serta menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren telah berupaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan berkualitas melalui berbagai program pengembangan bakat, fleksibilitas pembelajaran, dan kegiatan yang mempromosikan keberagaman. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan dalam mengakomodasi santri berkebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan yang sepenuhnya inklusif. Penelitian ini juga menganalisis kontribusi sektor non-pemerintah, khususnya program Dayah Ramah Anak oleh LSM Aceh Hijau, dalam mendukung kebijakan pendidikan berkualitas di pesantren. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi multi-stakeholder dan penyesuaian kebijakan untuk mencapai standar pendidikan berkualitas sesuai SDGs di lingkungan pesantren modern Aceh.

PENDAHULUAN

Penyediaan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas tinggi telah menjadi isu prioritas dan target SDGs di negara-negara yang merupakan anggota PBB. Isu ini selanjutnya menjadi pembahasan serius karena adanya pengakuan bahwa mutu pendidikan sangat mempengaruhi kualitas lulusan yang dihasilkan. Kualitas pendidikan yang rendah diakui dapat berkontribusi terhadap rendahnya kualitas individu, yang secara tidak langsung menjadi faktor yang menghambat tujuan utama pendidikan. Akhirnya pendidikan yang berkualitas saat ini dianggap sebagai fondasi yang vital oleh seluruh pihak yang terlibat, tidak terkecuali masyarakat (Alifah, 2021).

CONTACT

210802097@student.ar-raniry.ac.id

KEYWORDS

Quality Education, Islamic Boarding School, SDGs

Received: 20/09/2024

Revised: 15/10/2024

Accepted: 20/10/2024

Online: 04/12/2024

Published: 09/12/2024



Risenologi is licenced under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Public Licence \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sebagai anggota PBB, Indonesia saat ini juga telah menjadikan pendidikan berkualitas sebagai fokus utamanya, hal ini dapat dilihat dari sasaran pemerintah Indonesia pada tahun 2030 terkait pendidikan berkualitas berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (University, 2021). Untuk dapat mencapai sasaran tersebut pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mewujudkan hak mereka yang diamanatkan secara hukum untuk mendapatkan pendidikan. Guru perlu memperhatikan anak-anak yang dianggap berbeda dan tertinggal dari anak-anak lainnya, selain mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, lingkungan tanpa diskriminasi dan sistem pendidikan yang kontemporer. Namun demikian upaya untuk mencapai standar pendidikan yang baik bukan semata tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga perlu melibatkan kontribusi dari sektor swasta, lembaga pendidikan, dan khalayak umum.

Upaya menghubungkan capaian program internasional telah terkoneksi hingga ke tingkat nasional dan lokal. Dimana memadukan nilai-nilai tradisional dengan pendekatan kontemporer di lembaga pendidikan menjadi hal unik dalam upaya pencapaian tujuan SDGs, khususnya dalam bidang pendidikan. Aceh sebagai provinsi yang memiliki otoritas khusus untuk mengatur kebijakan berbasis kedaerahan, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian target SDGs tersebut. Karakteristik khas Aceh sebagai provinsi dengan landasan keagamaan yang kuat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan dapat menunjukkan perspektif penting tentang bagaimana institusi pendidikan lokal dapat berperan dalam agenda pembangunan global (Sani, 2019). Transformasi yang dialami pesantren modern di Aceh tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan zaman namun juga menunjukkan kewenangan lebih luas yang dimiliki untuk mengelola sistem pendidikannya, melalui mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas ke dalam kebijakan dan praktik pendidikan berkualitas (Siahaan et al., 2023).

Berbagai regulasi untuk menghasilkan pendidikan berkualitas telah hadir sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, Dimulai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menyatakan bahwa pada tahun 2030, setiap anak perempuan dan laki-laki harus memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata, dan bermutu (Pradana, 2021). Hingga Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, yang menguraikan hak-hak penduduk Aceh untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut terselenggara guna meningkatkan standar mutu mereka sendiri sejalan dengan standar pendidikan Indonesia (Dayah, 2018).

Akreditasi pesantren di Aceh merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan standar pendidikan Islam di wilayah tersebut. Proses akreditasi ini mencakup berbagai aspek penilaian, termasuk kurikulum, fasilitas, kualifikasi pengajar, dan manajemen lembaga. Hasil akreditasi tidak hanya mencerminkan kondisi pendidikan di masing-masing dayah, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif tentang lanskap pendidikan Islam di Aceh secara keseluruhan.

Table 1. Data Akreditasi Pesantren Provinsi Aceh.

Kategori	Angka	Jumlah Pesantren
Akreditasi A+	29	1.685
Akreditasi A	158	
Akreditasi B	362	
Akreditasi C	554	
Akreditasi D	582	

Berdasarkan data akreditasi pesantren di Provinsi Aceh, kualitas pendidikan menunjukkan variasi yang signifikan, dari 1.685 pesantren di Aceh, hanya 29 yang mendapat akreditasi A+ dan hanya 158 yang mendapat akreditasi A. Pesantren lainnya mendapat akreditasi B, C, dan D (Dayah Aceh, 2023), yang mengindikasikan masih rendahnya standar mutu pendidikan di sebagian besar lembaga pesantren (Mursyidi, 2023). Mayoritas pesantren tersebar dalam kategori akreditasi B (362 pesantren), C (554 pesantren), dan D (582 pesantren), yang mencerminkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan kualitas pendidikan, kurikulum, fasilitas, dan manajemen kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa masih terdapat pesantren yang belum menyelenggarakan

pendidikan secara komprehensif, mulai dari jenjang sekolah menengah pertama hingga universitas, sehingga menuntut upaya serius untuk meningkatkan mutu dan standar pendidikan Islam di wilayah Aceh.

Tingkat kelulusan santri pesantren dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas pendidikan di pesantren serta kesiapan para santri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Data ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan akademik para santri, tetapi juga merefleksikan efektivitas kurikulum pesantren dalam mempersiapkan siswa untuk bersaing di tingkat nasional.

Table 2. Data Tingkat Kelulusan Pesantren Kabupaten Aceh Besar di SNBP dan PTKIN 2023.

Nama	PTKIN	SNBP
MA Riab	103	29
MA Oemar Diyan	37	11
MA Al Manar	4	2
MA Darul Ihsan	55	9
MA Insan Qurani	55	7
MA Daruzzahidin	-	3
MA Al Kamal	-	2
MA Lhoong	-	1
MA Darul Aman	1	-

Berdasarkan data diperoleh dari kementerian agama wilayah Aceh, kita dapat melihat adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara tingkat kelulusan SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) di beberapa Madrasah Aliyah (MA) pesantren modern di Aceh. Ketimpangan jumlah kelulusan terlihat jelas bahwa jumlah siswa yang diterima melalui jalur PTKIN jauh lebih banyak dibandingkan dengan SNBP. Misalnya, MA Riab (Ruhul Islam Anak Bangsa) memiliki 29 siswa diterima melalui SNBP, sementara 103 siswa diterima melalui PTKIN. Pola serupa juga terlihat di MA lainnya. Perbedaan yang mencolok ini dapat mengindikasikan adanya kecenderungan sistem pendidikan di pesantren yang lebih berorientasi pada mata pelajaran keagamaan, sehingga siswa lebih siap menghadapi seleksi PTKIN dibandingkan SNBP (Aceh, 2023). Kesenjangan ini juga bisa menunjukkan kurangnya fokus atau sumber daya untuk mempersiapkan siswa menghadapi SNBP, yang umumnya mencakup mata pelajaran umum yang lebih luas sehingga kurangnya pemerataan/inklusif pada sistem pendidikan di pesantren. Hal ini mengindikasikan sistem pendidikan yang belum komprehensif, kurang merata, dan masih membutuhkan pengembangan yang substansial. Rendahnya jumlah pesantren dengan akreditasi tinggi, ditambah dengan keterbatasan kurikulum yang cenderung lebih fokus pada pendidikan keagamaan, menandakan bahwa kualitas pesantren di Aceh masih jauh dari standar ideal pendidikan modern yang seimbang antara pengetahuan umum dan keagamaan.

Adapun kebaharuan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu kebaharuan pengetahuan, menurut Baharuddin dalam jurnalnya berfokus pada pendidikan inklusif di SDN (Baharuddin & Saidang, 2020). Hal yang sama pada jurnal oleh Dewi berfokus pada pendidikan inklusif di pembelajaran taman kanak-kanak (P. S. D. Dewi et al., 2020). Selain itu menurut jurnal oleh Agustina berfokus pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan juga menggunakan pendekatan studi literatur (Agustina & Rahaju, 2021), kemudian penelitian oleh Baroroh berfokus pada pandangan atau perspektif guru dan orang tua terhadap pendidikan inklusif di taman kanak-kanak (Baroroh & Rukiyati, 2022), dan yang terakhir penelitian oleh Nurrahman berfokus pada kendala pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA (Nurrahman, 2022). Kebaharuan pengetahuan oleh peneliti adalah berfokus pada pendidikan berkualitas di pesantren modern Aceh. Alasan peneliti mengambil pesantren sebagai subjek dan lokasi adalah belum ada yang melakukan penelitian pendidikan berkualitas di pesantren dalam hal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Aceh. Hal tersebut menyebabkan penelitian ini memiliki urgensi dan novelty yang kuat sehingga penting dan harus dilakukan penelitian.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembenahan sistem pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, pesantren dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seimbang, baik dalam bidang keagamaan maupun umum dan mencapai sasaran SDGs. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam sistem pendidikan dayah memainkan peran penting dalam memperlengkapi generasi berikutnya untuk menangani tantangan global kontemporer sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dan sebagai lembaga pendidikan islam tradisional di Aceh, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap

akreditasi pondok pesantren dan mencetak santri yang bermutu, mandiri, dan memiliki minat serta bakat yang cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui jalur SNBP, PTKIN, maupun perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri.

Dalam konteks internasional, penelitian ini menawarkan beragam manfaat yang signifikan bagi komunitas global. Pertama-tama, studi ini dapat menjadi model pembelajaran berharga tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan modern dengan nilai-nilai tradisional Islam, memberikan wawasan mendalam bagi negara-negara Muslim lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Hal ini mendemonstrasikan bagaimana institusi pendidikan berbasis agama dapat berkontribusi secara efektif pada pencapaian SDGs tanpa mengorbankan identitas kultural mereka. Lebih lanjut, penelitian ini menyajikan contoh konkret implementasi SDGs di tingkat lokal yang dapat diadaptasi oleh wilayah-wilayah dengan karakteristik serupa di berbagai negara. Studi kasus dari Aceh ini menunjukkan bagaimana otonomi daerah khusus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung agenda pembangunan global, sekaligus memberikan perspektif unik tentang transformasi lembaga pendidikan tradisional dalam menghadapi tuntutan globalisasi. Hal ini menjadi referensi berharga bagi institusi pendidikan internasional dalam memahami dinamika pendidikan Islam di Indonesia, khususnya sistem pesantren.

Studi ini juga mempromosikan dialog antar budaya yang konstruktif antara tradisi pendidikan Barat dan Timur, sekaligus memperkaya literatur internasional tentang transformasi pendidikan tradisional dan memberikan perspektif baru dalam studi pendidikan Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pendidikan lokal, tetapi juga memberikan nilai tambah signifikan pada diskursus pendidikan internasional dan pencapaian tujuan pembangunan global.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *multiple case study*. Peneliti melakukan pengamatan pada beberapa pesantren di Aceh, dengan demikian tulisan ini menggunakan pendekatan *multiple case study* yang akan menggambarkan pemahaman tentang pendidikan berkualitas (Fahmi, 2024). Di dalam penelitian ini peneliti memperoleh data informasi secara langsung dari informan untuk menyelidiki proses serta memperoleh pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok maupun situasi tertentu.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji kebijakan pendidikan berkualitas di pesantren modern Aceh yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu catatan dan transkrip wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, platform website pemerintah dan media sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan observasi langsung, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mewawancarai tenaga pendidik di pesantren modern provinsi Aceh. Alasan peneliti mengambil pesantren sebagai subjek dan lokasi adalah belum ada yang melakukan penelitian pendidikan berkualitas di pesantren dalam hal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Aceh. Hal tersebut menyebabkan penelitian ini memiliki urgensi dan novelty yang kuat sehingga penting dan harus dilakukan penelitian.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan data yaitu dari wawancara dengan informan penelitian, kemudian peneliti melakukan reduksi data dengan mengambil hal yang penting saja di dalam data tersebut, selanjutnya peneliti melakukan *display* atau penyajian data dan tahap terakhir peneliti melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data lapangan terkait pendidikan berkualitas di pesantren modern provinsi Aceh.

HASIL DAN DISKUSI

Pendidikan berkualitas merupakan isu penting dalam hal pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang diatur dalam berbagai regulasi, diantaranya seperti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah menjadikan pendidikan berkualitas sebagai fokus utama program yang terus dikejar, hal ini dapat dilihat dari sasaran pemerintah pada tahun 2030 terkait pendidikan berkualitas berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, yang menguraikan hak-hak penduduk Aceh untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut terselenggara guna meningkatkan standar mutu mereka sendiri sejalan dengan standar pendidikan Indonesia.

Menurut hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa pesantren tersebut memiliki upaya yang cukup baik dalam memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Pesantren berusaha mengakomodasi santri dari berbagai latar belakang daerah dan budaya, bahkan termasuk santri asing dari Malaysia, dengan memberikan pendampingan khusus untuk membantu adaptasi mereka. Mereka

menyediakan berbagai program pengembangan bakat seperti kelompok Olimpiade, kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, tahfiz, dan kesenian daerah, serta bahkan menyediakan asrama khusus bagi santri yang memiliki bakat istimewa.

Namun, penelitian juga mengungkap beberapa tantangan yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, pesantren belum memiliki program terstruktur untuk mengidentifikasi potensi unik setiap santri sejak awal, dan masih belum optimal dalam mengakomodasi santri berkebutuhan khusus. Kebijakan penerimaan santri yang cenderung membatasi calon santri dengan kondisi kesehatan tertentu menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan pendekatan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, pesantren telah menunjukkan komitmen untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan yang menghargai keberagaman dan berupaya memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada para santri.

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mewujudkan hak mereka yang diamanatkan secara hukum untuk mendapatkan pendidikan. Guru perlu memperhatikan anak-anak yang dianggap berbeda dan tertinggal dari anak-anak lainnya, selain mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, lingkungan tanpa diskriminasi dan sistem pendidikan yang kontemporer. Setelah peneliti mengelaborasi kebijakan tersebut, terdapat tiga indikator yang dapat dihasilkan untuk mengukur pendidikan berkualitas yaitu: (1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua siswa; (2) menerima pendidikan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan mereka, terlepas dari keterbatasan fisik, emosional, mental, atau sosial atau potensi kecerdasan atau bakat luar biasa mereka; (3) melaksanakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan peserta didik atau pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Memberikan Kesempatan Seluas-luasnya kepada Semua Peserta Didik

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik merupakan indikator dasar dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi sangat penting karena pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang telah dijamin oleh hukum, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi. Ketika setiap peserta didik mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, hal ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan amanat konstitusi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas tanpa terkecuali.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pesantren berusaha memberikan kesempatan belajar kepada para santri, namun masih terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pesantren ini menerapkan sistem pendidikan 24 jam yang menuntut kondisi fisik prima dari para santrinya. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam proses penerimaan santri baru, di mana pesantren cenderung tidak menerima calon santri dengan kondisi kesehatan tertentu yang dianggap parah atau berpotensi mengganggu kegiatan belajar.

Meskipun demikian, pesantren tidak serta-merta menolak semua santri dengan kondisi khusus. Mereka tetap berupaya mengakomodasi santri yang mengalami masalah kesehatan setelah diterima di pesantren. Misalnya, ada kasus santri yang mengalami kecelakaan parah hingga mengalami cedera otak. Pesantren tetap mempertahankan santri tersebut dan memberikan pendampingan khusus untuk membantu proses pemulihan dan adaptasinya dalam kegiatan belajar. Namun, perlu dicatat bahwa pesantren ini belum memiliki program atau tes khusus untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi santri berkebutuhan khusus sejak awal. Fokus mereka masih pada santri yang dianggap "normal". Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon santri, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Di sisi lain, pesantren ini membuka kesempatan bagi santri dari berbagai latar belakang daerah, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia. Untuk santri asing yang mengalami kesulitan bahasa, pesantren berupaya memberikan pendampingan khusus untuk membantu proses adaptasi mereka. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, meskipun masih terbatas pada aspek perbedaan budaya dan bahasa.

Dalam hal pengembangan bakat dan minat, pesantren menyediakan berbagai program ekstrakurikuler seperti kaligrafi, tahfiz, dan kesenian daerah. Mereka juga memiliki kelompok Olimpiade untuk santri yang berbakat di bidang akademik. Bahkan, untuk bidang tertentu seperti kaligrafi, disediakan asrama khusus bagi santri yang menunjukkan bakat istimewa. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kesempatan pengembangan diri yang lebih luas bagi para santri. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal memberikan kesempatan yang lebih inklusif. Pesantren perlu mengembangkan kebijakan dan program yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi calon santri dengan berbagai kondisi dan kebutuhan khusus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesantren dapat memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada semua peserta

didik, sesuai dengan indikator SDGs pendidikan berkualitas. Dengan demikian, pesantren dapat berkontribusi lebih optimal dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.

Berdasarkan temuan dan analisis mendalam terhadap penelitian sebelumnya oleh (Suharyanto & Mulyono, 2023), indikator Memberikan Kesempatan Seluas-luasnya kepada Semua Peserta Didik menunjukkan implementasi yang masih belum optimal dan memiliki sejumlah keterbatasan signifikan. Di SMA N 1 Sentolo, pendekatan pendidikan berkualitas baru pada tahap awal dengan menyediakan 2 kursi khusus untuk penyandang disabilitas dan belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK), meskipun telah berupaya melakukan modifikasi kurikulum dan metode pembelajaran. Sementara itu, penelitian ini menampilkan gambaran yang lebih kompleks, di mana lembaga pendidikan tersebut masih memiliki batasan ketat dalam penerimaan peserta didik, cenderung menolak calon santri dengan kondisi kesehatan tertentu dan belum memiliki program sistematis untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa upaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik di lembaga pendidikan, khususnya pesantren, masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Meskipun lembaga pendidikan telah berupaya memberikan akses pendidikan dengan membuka peluang bagi santri dari berbagai latar belakang daerah dan bahkan luar negeri, serta menyediakan program pengembangan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, terdapat keterbatasan mendasar dalam mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Pesantren cenderung memiliki kriteria ketat dalam penerimaan santri, dengan fokus utama pada peserta didik yang dianggap "normal" dan memiliki kondisi fisik prima. Meskipun terdapat beberapa kasus di mana lembaga pendidikan memberikan pendampingan khusus bagi santri yang mengalami kendala kesehatan setelah diterima, mereka belum memiliki program sistematis untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus sejak awal.

Pendidikan yang Bermutu Sesuai dengan Kebutuhan dan Kemampuannya

Pendidikan yang bermutu dapat diartikan sebagai tahapan pelayanan kependidikan yang mendorong segala potensi yang ada dalam diri siswa yang bertumbuh kembang dengan baik secara mandiri. Pengajar berperan sebagai fasilitator dan motivator selama proses pembelajaran. Sebagai hasilnya, siswa menjadi berkembang, dan tujuan utama pendidikan adalah membantu mereka menjadi mandiri (Kotten, 2016). Indikator ini menjadi sangat krusial karena setiap peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran, baik dari segi fisik, emosional, mental, maupun sosial. Penyesuaian kualitas pendidikan dengan kebutuhan individual tidak hanya memastikan efektivitas proses pembelajaran, tetapi juga mengoptimalkan pengembangan potensi setiap peserta didik secara maksimal. Pendekatan ini mengakui bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur dengan standar yang seragam, melainkan harus mempertimbangkan keberagaman kemampuan peserta didik, mulai dari mereka yang memiliki keterbatasan hingga mereka yang dianugerahi bakat luar biasa. Dengan menerapkan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuan, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pesantren ini berupaya menyediakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan santrinya, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pesantren menyadari pentingnya mengembangkan potensi individu santri dan berusaha mengakomodasi keragaman bakat serta minat mereka. Salah satu upaya yang dilakukan pesantren adalah menyediakan program-program khusus untuk mengembangkan bakat santri. Mereka memiliki kelompok Olimpiade untuk santri yang berbakat di bidang akademik, yang memungkinkan santri-santri tersebut untuk mengasah kemampuan mereka lebih jauh. Selain itu, pesantren juga menyediakan program ekstrakurikuler seperti kaligrafi, tahfiz, dan berbagai bentuk kesenian daerah. Khusus untuk bidang kaligrafi, pesantren bahkan menyediakan asrama khusus bagi santri yang menunjukkan bakat istimewa, menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan potensi santri secara optimal.

Dalam hal pembelajaran di kelas, para guru berusaha mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari para santri. Meskipun pendekatan yang digunakan bervariasi tergantung pada masing-masing guru, ada kesadaran akan pentingnya memahami kondisi dan kemampuan individu santri. Beberapa guru memilih untuk memberikan kelonggaran kepada santri yang kelelahan karena padatnya kegiatan pesantren, sementara yang lain mungkin menerapkan pendekatan yang lebih tegas. Keragaman pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam proses pembelajaran, meskipun mungkin perlu standarisasi lebih lanjut untuk memastikan konsistensi kualitas pengajaran.

Pesantren juga berupaya memastikan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mereka menyadari pentingnya pembentukan akhlak di era modern, sehingga memasukkan fokus

pada pembentukan karakter dalam kurikulum mereka. Hal ini menunjukkan kesadaran pesantren akan pentingnya menyeimbangkan pengetahuan akademik dengan pengembangan karakter, yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Untuk santri yang memiliki latar belakang berbeda, seperti santri dari luar negeri, pesantren berupaya memberikan pendampingan khusus. Misalnya, untuk santri dari Malaysia yang mengalami kesulitan bahasa, disediakan bimbingan tambahan untuk membantu mereka beradaptasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ini menunjukkan kesadaran pesantren akan kebutuhan khusus santri tertentu dan upaya mereka untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Selain itu, meskipun ada upaya untuk mengembangkan bakat santri, belum terlihat adanya program yang terstruktur untuk mengidentifikasi potensi unik setiap santri sejak awal masa studi mereka. Pengembangan bakat cenderung berfokus pada bidang-bidang tertentu yang sudah ada programnya, sementara potensi unik lainnya mungkin belum teridentifikasi dan terfasilitasi dengan optimal.

Berdasarkan hasil temuan dengan penelitian sebelumnya, indikator Pendidikan yang Bermutu Sesuai dengan Kebutuhan dan Kemampuannya selaras dengan penelitian sebelumnya oleh (Oktavianatun & Nugraheni, 2024), peningkatan kualitas pendidikan yang difokuskan pada pengembangan potensi individu peserta didik, dengan penekanan pada fleksibilitas kurikulum, pengakuan terhadap keberagaman kemampuan, dan pentingnya pendidikan inklusif. Kedua penelitian menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat diukur dengan standar seragam, melainkan harus memperhatikan kebutuhan spesifik setiap peserta didik, termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung, pengembangan bakat, dan pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap keragaman kemampuan, sejalan dengan prinsip SDGs Tujuan 4 tentang Pendidikan Berkualitas.

Secara keseluruhan, pesantren ini menunjukkan upaya yang baik dalam menyediakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan santri. Pesantren menunjukkan komitmen dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai strategi, seperti menyediakan program-program khusus untuk mengembangkan bakat (Olimpiade, kaligrafi, tahfiz, dan kesenian daerah), memberikan fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran, dan merancang kurikulum yang memperhatikan pembentukan karakter di era modern. Meskipun telah melakukan upaya signifikan, termasuk pendampingan khusus untuk santri dengan latar belakang berbeda. Namun, masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal mengidentifikasi dan mengakomodasi kebutuhan belajar yang lebih beragam, termasuk untuk santri berkebutuhan khusus. Dengan peningkatan dalam aspek-aspek ini, pesantren dapat lebih optimal dalam memenuhi indikator SDGs pendidikan berkualitas, khususnya dalam menyediakan pendidikan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap santri. Tujuan pengoptimalan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aniska, 2016), sebagaimana menurut Dedy Kustawan (2012: 80) menyatakan bahwa infrastruktur dan fasilitas pembelajaran yang memadai disediakan oleh sekolah pendidikan inklusif, yang juga menjamin kelancaran kurikulum. Semua siswa harus dapat mengakses prasarana dan sarana di sekolah inklusif.

Menyediakan Pendidikan yang Menghargai Keberagaman dan Tidak Mendiskriminasi Peserta Didik

Menghargai keberagaman, Suasana yang menghormati dan menghargai keragaman dipupuk melalui pendidikan yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya. Hal ini mendorong semua orang, tanpa memandang asal budaya, untuk memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesetaraan, dan keadilan (Phytanza et al., 2023). Indikator ini memiliki peran strategis karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi budaya, sosial, ekonomi, maupun geografis. Penerapan pendidikan yang menghargai keberagaman menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, terlepas dari latar belakang mereka - baik yang berasal dari daerah terpencil, masyarakat adat, korban bencana alam, maupun yang menghadapi keterbatasan ekonomi - mendapatkan akses dan perlakuan yang setara dalam pendidikan. Prinsip non-diskriminasi dalam pendidikan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan menerapkan pendidikan yang menghargai keberagaman, sistem pendidikan dapat berperan aktif dalam menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai di antara peserta didik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan generasi yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pesantren ini berupaya menyediakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak mendiskriminasi peserta didik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Pesantren menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun kebersamaan di antara santri yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dan budaya.

Salah satu upaya signifikan yang dilakukan pesantren adalah dengan menempatkan santri dari berbagai daerah secara bercampur dalam satu kamar. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan dan mencegah terbentuknya kelompok-kelompok eksklusif berdasarkan asal daerah. Dengan tinggal bersama santri dari daerah lain, para santri diberikan kesempatan untuk saling mengenal, berbagi pengalaman, dan memahami keragaman budaya. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi potensi diskriminasi berbasis daerah asal.

Pesantren juga mengadakan kegiatan yang memperkenalkan dan merayakan keberagaman budaya, seperti Anekaria, yaitu penampilan tari daerah. Yang menarik, pesantren tidak mewajibkan santri untuk menampilkan tarian dari daerah asal mereka sendiri. Sebaliknya, santri didorong untuk mempelajari dan menampilkan tarian dari daerah lain. Kebijakan ini tidak hanya memperkenalkan keragaman budaya Indonesia kepada para santri, tetapi juga mendorong mereka untuk mengapresiasi dan terlibat langsung dalam budaya yang berbeda dari latar belakang mereka sendiri. Ini merupakan langkah positif dalam membangun sikap saling menghargai dan memahami keberagaman.

Dalam hal penggunaan bahasa, pesantren menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusivitas. Mereka menggunakan panggilan umum seperti "ceh" (singkatan dari Aceh) untuk santri baru yang berasal dari daerah tersebut, tanpa membedakan asal daerah. Kebijakan ini membantu menciptakan rasa kesetaraan di antara para santri dan mengurangi potensi diskriminasi berbasis identitas kedaerahan. Selain itu, pesantren juga memberlakukan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, terutama bagi santri baru, untuk memastikan semua santri dapat berkomunikasi dengan baik tanpa hambatan bahasa daerah.

Pesantren juga berupaya untuk tidak memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada santri berdasarkan latar belakang sosial ekonomi mereka. Baik anak pejabat, orang kaya, maupun santri dari keluarga biasa diperlakukan sama dalam hal aturan dan tanggung jawab di pesantren. Kebijakan ini penting untuk menanamkan nilai kesetaraan dan menghindari diskriminasi berbasis status sosial ekonomi. Untuk santri asing, seperti yang berasal dari Malaysia, pesantren menyediakan pendampingan khusus untuk membantu mereka beradaptasi, terutama dalam hal bahasa. Ini menunjukkan kesediaan pesantren untuk mengakomodasi kebutuhan khusus santri dari latar belakang budaya yang berbeda, memastikan mereka tidak terdiskriminasi karena perbedaan bahasa atau budaya. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang sepenuhnya inklusif dan bebas diskriminasi. Pesantren belum memiliki program atau kebijakan khusus untuk mengakomodasi santri berkebutuhan khusus. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung terhadap calon santri yang mungkin memiliki kebutuhan belajar khusus. Selain itu, kebijakan pesantren yang cenderung tidak menerima calon santri dengan kondisi kesehatan tertentu juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi, meskipun hal ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan santri untuk mengikuti program pesantren yang intensif.

Meskipun pesantren berupaya untuk membangun kebersamaan, masih ada indikasi adanya pengelompokan berdasarkan daerah asal, terutama di awal masa studi santri. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif masih memerlukan perhatian dan strategi lebih lanjut. Secara keseluruhan, pesantren ini menunjukkan upaya yang baik dalam menyediakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan berusaha untuk tidak mendiskriminasi peserta didik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal mengakomodasi kebutuhan santri berkebutuhan khusus dan memastikan inklusivitas yang lebih menyeluruh. Dengan peningkatan dalam aspek-aspek ini, pesantren dapat lebih optimal dalam memenuhi indikator SDGs pendidikan berkualitas, khususnya dalam menyediakan pendidikan yang benar-benar menghargai keberagaman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Berdasarkan hasil temuan dengan penelitian sebelumnya, indikator Menyediakan Pendidikan yang Menghargai Keberagaman dan Tidak Mendiskriminasi Peserta Didik selaras dengan prinsip pendidikan multikultural dan toleransi yang ditekankan dalam penelitian oleh (Y. A. Dewi & Mardiana, 2023). Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai keragaman budaya, sosial, dan individual, dengan tujuan membangun sikap toleransi, empati, dan saling menghormati di antara peserta didik. Penelitian ini mendukung gagasan bahwa pendidikan berkualitas harus menciptakan lingkungan inklusif yang memberikan akses setara bagi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang budaya, sosial, ekonomi, atau geografis, sejalan dengan prinsip pendidikan multikultural yang bertujuan membentuk masyarakat yang pluralis, demokratis, dan humanis.

Secara keseluruhan pesantren menunjukkan upaya signifikan untuk membangun lingkungan inklusif melalui berbagai strategi, seperti menempatkan santri dari berbagai daerah dalam satu kamar, mengadakan kegiatan budaya yang mendorong apresiasi lintas budaya (seperti Anekaria), dan menerapkan kebijakan kesetaraan dalam penggunaan bahasa dan perlakuan terhadap santri. Meskipun pesantren telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghargai keberagaman.

Kontribusi dari Sektor Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Kebijakan Pendidikan Berkualitas

Tidak mungkin untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya pendidikan bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi. Akses yang luas akan meningkatkan tingkat pendapatan, memberdayakan masyarakat dan komunitas, serta mendorong standar yang lebih tinggi. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran yang semakin besar dalam bidang pendidikan. LSM sering melakukan intervensi untuk menutup kesenjangan dengan menawarkan sumber daya, dukungan, dan kesempatan pendidikan kepada masyarakat miskin. Mereka mampu memenuhi kebutuhan tertentu yang mungkin terlewatkan oleh upaya pemerintah yang lebih luas karena fleksibilitas dan pendekatan yang berfokus pada masyarakat (Ahmad, 2022). LSM dengan fleksibilitas dan kedekatan mereka dengan masyarakat dapat memberikan perspektif yang berharga dalam pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan, serta mampu mengidentifikasi tantangan dan solusi yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang birokrasi. Selain itu, LSM juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan berkualitas benar-benar mencapai sarasannya, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan adanya kontribusi aktif dari LSM, implementasi kebijakan pendidikan berkualitas dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, serta lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Berikut adalah beberapa peran LSM yang berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan berkualitas di pesantren modern provinsi Aceh:

Tabel 3. LSM yang berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan berkualitas

Nama	Peran
Yayasan Aceh Hijau	meningkatkan kapasitas lokal untuk mendukung ketahanan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif berbasis masyarakat, advokasi, penelitian, dan pengembangan kapasitas (Fadhillah, 2024).
HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh)	Dalam aspek keagamaan, HUDA berperan memberikan fatwa dan pandangan hukum Islam serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Organisasi ini juga memiliki fungsi sosial sebagai penengah dalam berbagai konflik masyarakat dan memberikan bimbingan moral kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, HUDA aktif mengembangkan pendidikan Islam melalui sistem dayah (pesantren tradisional) dan menjaga keberlangsungan tradisi keilmuan Islam (Irawan, 2015).
UNICEF Aceh	UNICEF aktif dalam berbagai program pembangunan dan pemulihan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam bidang pendidikan, UNICEF berkontribusi dalam pembangunan kembali sekolah-sekolah yang hancur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang lebih baik. UNICEF juga berperan dalam penguatan sistem perlindungan anak di Aceh, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi lokal, UNICEF terus berupaya memastikan hak-hak anak terpenuhi dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Aceh (UNICEF, 2024).

Berdasarkan informasi yang disampaikan, program Dayah Ramah Anak yang dilaksanakan oleh Yayasan Aceh Hijau sejalan dengan indikator SDGs tentang pendidikan berkualitas, khususnya dalam hal mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap peserta didik. Program ini berupaya menciptakan lingkungan pendukung di dayah (pesantren) agar anak-anak dapat menikmati hak mereka, terutama hak untuk pendidikan dan pengasuhan positif secara baik. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keunikan dayah sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya menyediakan layanan pendidikan tetapi juga pengasuhan.

Salah satu fokus utama program ini adalah mengatasi masalah kekerasan yang terjadi di dayah. Yayasan Aceh Hijau menyadari bahwa kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan, termasuk dayah, masih menjadi masalah serius. Program ini berusaha mengubah paradigma dan praktik pengajaran dari metode yang cenderung menggunakan kekerasan menjadi pendekatan yang lebih positif dan ramah anak. Ini dilakukan melalui pelatihan untuk para ustaz dan ustazah tentang pengasuhan positif dan pemahaman hak-hak anak.

Selain itu, program ini juga berupaya membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di dayah. Hal ini termasuk mendorong kebijakan perlindungan anak di tingkat dayah dan membangun sistem pelaporan yang efektif. Dengan demikian, program ini tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga memastikan adanya sistem yang dapat merespon jika terjadi kasus kekerasan. Program Dayah Ramah Anak juga berusaha menghapuskan diskriminasi dengan memastikan bahwa semua anak di dayah, terlepas dari latar belakang mereka, mendapatkan perlakuan yang setara dan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini termasuk upaya

untuk menghubungkan dayah dengan layanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah, memastikan bahwa anak-anak di dayah tidak terdiskriminasi dalam akses terhadap layanan dasar.

Tabel 4. Komponen Program LSM Aceh Hijau Terhadap Lingkungan Tanpa Diskriminasi di Pesantren

Komponen Utama Program	Deskripsi
Penguatan Kebijakan	Program ini bekerja pada tiga tingkatan - pemerintah, dayah, dan desa. Di tingkat pemerintah, program ini mendorong adopsi kebijakan yang mendukung perlindungan anak di dayah. Di tingkat dayah, program ini membantu dalam pengembangan kebijakan internal untuk perlindungan anak. Di tingkat desa, program ini berupaya membangun mekanisme dukungan untuk anak-anak di dayah.
Peningkatan Kapasitas	Program ini memberikan pelatihan kepada pimpinan dayah, ustaz, dan ustazah tentang pengasuhan positif, hak-hak anak, dan metode pengajaran yang ramah anak. Ini bertujuan untuk mengubah pendekatan pengajaran dari metode yang mungkin menggunakan kekerasan menjadi metode yang lebih positif dan mendukung.
Pemberdayaan Santri	Program ini juga melibatkan santri (siswa) melalui program "Santri Pelopor". Santri diberikan pelatihan dan diberdayakan untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, memahami hak-hak mereka, dan mengetahui cara melaporkan jika terjadi pelanggaran.
Keterlibatan Masyarakat	Program ini berupaya melibatkan masyarakat sekitar dayah, terutama desa-desa terdekat. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang perlindungan anak dan pentingnya pendidikan yang ramah anak.
Pengembangan Mekanisme Pelaporan	Program ini berupaya membangun sistem pelaporan yang efektif jika terjadi kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak di dayah.
Integrasi Layanan	Program ini juga berupaya menghubungkan dayah dengan layanan pemerintah yang tersedia, seperti layanan kesehatan dari Puskesmas, untuk memastikan anak-anak di dayah mendapatkan akses ke layanan dasar yang mereka butuhkan.
Advokasi dan Kampanye	Yayasan Aceh Hijau juga melakukan advokasi kepada pemerintah dan melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang ramah anak di dayah.

Program ini dilaksanakan dengan durasi 1,5 tahun, meskipun idealnya membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk implementasi yang lebih efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi awal dari beberapa dayah dan keterbatasan waktu, program ini telah berhasil menciptakan perubahan positif di beberapa dayah yang terlibat. Yayasan Aceh Hijau juga berkomitmen untuk melanjutkan upaya mereka dalam mempromosikan pendidikan ramah anak di dayah bahkan setelah program formal berakhir, melalui berbagai inisiatif lanjutan dan kolaborasi dengan pemerintah serta stakeholder lainnya.

Meskipun program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk durasi yang terbatas dan resistensi awal dari beberapa dayah, upaya Yayasan Aceh Hijau dalam mempromosikan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di dayah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs. Program ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat memungkinkan untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem pendidikan tradisional seperti dayah.

Berdasarkan hasil temuan, kontribusi LSM terhadap kebijakan pendidikan berkualitas menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan penelitian oleh (Raharjo, 2008). Penelitian terdahulu dari LSM Forppendidik di Kota Depok mengungkapkan peran LSM dalam memonitor penyelenggaraan pendidikan, mengkritisi kenaikan biaya pendidikan, dan mendorong pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Sementara penelitian ini membahas Yayasan Aceh Hijau menampilkan contoh konkret kontribusi LSM melalui program Dayah Ramah Anak, yang secara langsung berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatasi isu kekerasan, diskriminasi, dan mendorong pendekatan pengasuhan positif di pesantren. Kedua dokumen memperlihatkan bahwa LSM berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawasi, mengadvokasi, dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Secara keseluruhan peran strategis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung kebijakan pendidikan berkualitas sangatlah penting. LSM berkontribusi melalui penyediaan sumber daya, pelatihan, advokasi, dan inisiatif berbasis masyarakat untuk mengatasi tantangan seperti kekerasan, diskriminasi, serta kurangnya akses dan mutu pendidikan. Sebagai contoh, program Dayah Ramah Anak oleh Yayasan Aceh Hijau berupaya

menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif di pesantren dengan pendekatan pengasuhan positif, penguatan kebijakan, dan pemberdayaan santri. Kontribusi LSM melengkapi upaya pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs, terutama dalam pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak dapat membawa perubahan positif yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas pesantren modern provinsi Aceh telah berjalan dengan maksimal dan telah menunjukkan upaya untuk memberikan kesempatan belajar kepada santri dari berbagai latar belakang. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam mengakomodasi santri berkebutuhan khusus. Upaya penyediaan pendidikan bermutu dilakukan melalui berbagai program pengembangan bakat, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman. Pesantren juga menerapkan kebijakan untuk menghargai keberagaman, seperti penempatan santri dari berbagai daerah dalam satu kamar dan penyelenggaraan kegiatan yang memperkenalkan budaya daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang sepenuhnya inklusif dan bebas diskriminasi, terutama terkait dengan penerimaan dan akomodasi santri berkebutuhan khusus. Kontribusi sektor umum, seperti program Dayah Ramah Anak oleh Yayasan Aceh Hijau, telah membantu dalam mengurangi diskriminasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan pesantren. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal identifikasi dan akomodasi kebutuhan khusus santri, serta penciptaan lingkungan yang lebih inklusif. Kesimpulannya, meskipun ada kemajuan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam sistem pendidikan pesantren untuk memenuhi standar SDGs tentang pendidikan berkualitas. Penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan inklusivitas pendidikan di pesantren, serta peran penting kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam mencapai tujuan ini.

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. *Pertama*, pesantren perlu mengembangkan sistem identifikasi dan asesmen yang komprehensif untuk mengenali kebutuhan khusus santri sejak awal, termasuk mempertimbangkan penerimaan santri berkebutuhan khusus dengan menyediakan fasilitas dan program pendampingan yang sesuai. *Kedua*, perlu adanya standarisasi pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan keragaman kemampuan dan kondisi santri, dengan tetap mempertahankan fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan individual. *Ketiga*, pengembangan program terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unik setiap santri perlu ditingkatkan, tidak hanya terbatas pada bidang-bidang yang sudah ada programnya. *Keempat*, perlu adanya penguatan kolaborasi dengan LSM seperti Yayasan Aceh Hijau, HUDA, dan UNICEF untuk mengembangkan program-program yang mendukung pendidikan inklusif dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, K. (2023). *kemenag Aceh Besar Sampaikan Apresiasi, 340 Siswa MA Lulus Undangan PTN*. Kemenag Aceh. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kemenag-aceh-besar-sampaikan-apresiasi-340-siswa-ma-lulus-undangan-ptn?audio=1>
- Agustina, R. S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 109–124. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p109-124>
- Ahmad, I. (2022). The Role of NGOs in Pakistani Education. *Journal of Education and Finance Review*, 1(1), 12–21. <https://doi.org/10.62843/jefr/2022.4097302>
- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Mengejar Keteringgalan Dari Negara Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.968
- Aniska, T. D. (2016). LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPI) SEKOLAH DASAR WILAYAH KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.
- Baharuddin, B., & Saidang, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SDN No. 39 Cakke. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 189–204. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i2.717>
- Baroroh, E., & Rukiyati, R. (2022). Pandangan Guru dan Orang Tua tentang Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3944–3952. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2510>
- Dayah Aceh, D. P. (2023). *Surat Pengantar Penetapan Database Tipe Dayah Aceh* (p. 66).
- Dayah, D. P. (2018). *SK ACEH QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*.

- Dewi, P. S. D., Ujianti, P. R., & Magta, M. (2020). Penerapan Pendidikan Inklusif Pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak (Studi Kasus Pada TK Rare Bali Shool). *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 87–97. <https://unimuda.ejournal.id/jurnalpendidikan/article/view/441/391>
- Dewi, Y. A., & Mardiana, M. (2023). Sikap Toleransi Melalui Pembelajaran Multikultural Pada Siswa Sekolah Dasar. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(1), 100. <https://doi.org/10.20527/pakis.v3i1.7535>
- Fadhillah, T. H. (2024). *Kemenag Aceh Dukung Program Dayah Ramah Anak*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/daerah/518949/kemenag-aceh-dukung-program-dayah-ramah-anak>
- Fahmi. (2024). *PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI; ANALISIS TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA*. 5, 224–233.
- Irawan, A. (2015). *PERKEMBANGAN HIMPUNAN ULAMA DAYAH ACEH (HUDA), 1999-2013* [universitas syiah kualala]. <https://etd.usk.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=14178&page=1>
- Kotten, N. B. (2016). Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Bermutu. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.37478/jpe.v1i1.54>
- Mursyidi, M. (2023). Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren di Aceh (Studi Penelitian Pesantren Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireuen - Aceh). *ISLAMIC PEDAGOGY: Journal of Islamic Education*, 1(1), 64–84. <https://doi.org/10.52029/ipjie.v1i1.141>
- Nurrahman, R. I. (2022). *KENDALA PENGAWASAN DINAS PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA KOTA SURABAYA* Ridwan Iwan Nurrahman (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) Arinto Nugrobo (S1 Ilmu Hukum, Fakultas. 1.
- Oktavianatun, A., & Nugraheni, N. (2024). Analisis Perkembangan Pendidikan Berkualitas Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 113–118.
- Phytanza, D. T. P., Nur, R. A., Hasyim, Mappaompo, A. M., Rahmi, S., Oualeng, A., Silaban, P. S. M., Suyuti, Iswati, & Rukmini, B. S. (2023). Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, dan Tujuan. In *EduHumaniora Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* (Issue 1). <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFAI/article/view/17>
- Pradana, T. (2021). *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kota Pekanbaru*. 1–112. <https://repository.uir.ac.id/17493/>
- Raharjo, S. B. (2008). PERAN LSM FORUM PEDULI PENDIDIKAN (FORPPENDIK) DALAM MONITORING PENDIDIKAN DIKOTA DEPOK (Studi Kasus SDN Tugu 8 Cimanggis) Oleh : Jajang Heriyana JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 1429 H. / 2008 M. In *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* (Vol. 16, Issue 2).
- Sani, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Ius Civile*, 49–59.
- Siahaan, R. L. M., Juli Arianti, & Thalib, N. (2023). Perkembangan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis SDGs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 975–985. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>
- Suharyanto, & Mulyono, R. (2023). Kemitraan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Disabilitas. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 3159–3172. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v8i2.634>
- UNICEF, I. (2024). *Pesantren di Aceh Melawan Kekerasan dengan Kasih Sayang*. Indonesia, UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/pesantren-di-aceh-melawan-kekerasan-dengan-kasih-sayang>
- University, I. (2021). *SDGs Pendidikan Berkualitas*. Sekolah Vokasi Ipb. <https://sv.ipb.ac.id/sdgs-pendidikan-berkualitas/>